

# MOHAMMAD NATSIR: KONSEP HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN ISLAM DALAM MOSI INTEGRAL NATSIR

Dimas Aldi Pangestu, Ajat Sudrajat

Universitas Negeri Yogyakarta  
*dimasaldi.2019@student.uny.ac.id*

## Abstrack

Natsir's Integral Motion was an important moment to prevent disintegration of the nation. The purpose of this paper is to analyze the relationship between state and Islam in Natsir's Integral Motion. The research using the historiography method from Kuntowijoyo with the steps including topic selection, heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. Natsir's Integral Motion in the conception of Islam and the state can be seen in two contexts of welfare and unity. Indonesia cannot be separated from religion so that be merged back into the Republic of Indonesia an ideal state according to Islam. The state aims to meet the needs of people both physically and spiritually which according to Islam need to be fulfilled by the state are insufficient.

**Keyword:** Natsir, Integral Motion, Unity, and Welfare.

## Abstrak

Momen penyelamatan penting Natsir untuk mencegah disintegrasi bangsa adalah Mosi Integral Natsir. Tujuan artikel ini adalah menganalisis hubungan antara negara dan Islam dalam Mosi Integral Natsir. Metode yang digunakan adalah metode sejarah Kuntowijoyo dengan langkah-langkah pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Mosi Integral Natsir dalam konsepsi Islam dan negara bisa dilihat dalam dua konteks kesejahteraan dan persatuan. Indonesia menurut beliau secara *de facto* dalam persoalan kenegaraan tidak bisa dipisahkan dari agama sehingga Republik Indonesi Serikat perlu dilebur kembali ke Republik Indonesia negara yang ideal menurut Islam. Negara bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jasmani maupun rohani dimana hak dan kewajiban yang menurut Islam perlu dipenuhi negara tidak mencukupi.

**Kata Kunci:** Natsir, Mosi Integral, Persatuan dan Kesejahteraan.

*Article History: Received 20 February 2020, Revised: 15 March 2020, Accepted: 29 April 2020, Available online 01 June 2020*

## **Pendahuluan**

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh nasional dan pembaharu Indonesia. Natsir merupakan sosok penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai dai', birokrat dan politisi ternama di Indonesia. Sebagai seorang dai' ternama pernah menduduki jabatan sebagai wakil Presiden Alam Islami dan sebagai tokoh puncak Rabithah Alam Islami serta menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tahaun 1967-1993 (wafat) (Tabroni, 2017: 41). Peranan Natsir begitu penting bagi kelangsungan eksistensi dari negara Indonesia.

Berbagai pengaruh Natsir dalam berbagai bidang di Indonesia patut dipuji oleh masyarakat Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau sebagai seorang birokrat menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Penerangan (1946-1948), anggota DPR RIS dan Perdana Menteri (1950-1951). Jabatan-jabatan yang diembannya tidak terlepas dari kejujuran perjuangannya (Setyaningsih, 2016: 75). Natsir sebagai seorang negarawan mempunyai sifat kepemimpinan yang disegani oleh tokoh-tokoh politik masa itu.

Natsir pernah menduduki jabatan puncak sebagai seorang politisi. Beliau pernah menjadi ketua dari partai Islam terbesar pada asaat itu yaitu Masyumi. Melalui partai tersebut Natsir memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Natsir mempunyai pemikiran politik yang sangat berlawanan dengan pandangan Sukarno. Pada masa revolusi fisik (Agustus 1945-Desember 1949) Natsir bersama-sama Soekarno dan Moh. Hatta memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beliau menjadi seorang pejuang yang aktif dalam barisan pimpinan tertinggi revolusi. Peranan dari seorang Natsir

menjadi sangat penting terutama dalam menyelamatkan Republik Indonesia (Setyaningsih, 2016: 75-76). Momen paling luar biasa yang penting dilakukan oleh seorang Natsir adalah mencegah disintegrasi bangsa melalui Mosi Integral Natsir.

Mosi integral Natsir disampaikan pada 3 April 1950 di hadapan DPR (Muliati, 2015: 132). Mosi tersebut memberikan harapan bagi negara Indonesia yang terpecah belah menjadi tujuh belas negara bagian. Mosi Integral Natsir berperan menjadikan integrasi menuju persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Natsir begitu berat karena beliau sebagai ketua umum Masyumi pada masa itu.

Sebagai seorang ketua Masyumi Natsir mempunyai peluang untuk mendekati berbagai fraksi di DPR. Natsir berukangkali mengadakan pendekatan terhadap berbagai partai dan kekuatan semua golongan di DPRS (Muliati, 2015: 132). Pendekatan tersebut berbuah hasil dimana setelah mosi dibacakan oleh Natsir, kemudian disetujui oleh semua fraksi dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya Republik Indonesia Serikat.

Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah adanya kesepakatan yang terjadi pada Konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag Belanda. KMB dilaksanakan untuk mengakhiri konfrontasi antara Belanda dan Indonesia. Semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, pihak Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masuk kembali ke Indonesia bersama dengan sekutu.

Pihak Belanda yang diwakili oleh NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) memiliki tujuan yaitu ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Belanda melancarkan aksi Polisionil melalui Agresi Militer Belanda ke-I dibawah pimpinan Letnan Jenderal S. Spoor (seorang Panglima Militer Belanda) yang berkedudukan di Jakarta (Budiman, 2017: 88). Berbagai perundingan dilakukan untuk membahas perdamaian

diantara kedua pihak, tetapi selalu berakhir dengan pembatalan sepihak.

Selepas perjanjian Renville yang dibatalkan, Belanda pada 19 Desember 1948 melakukan Agresi Militer II. Agresi Militer dimulai pada pukul 05.30 pagi. Sebelum para pemimpin Indonesia ditangkap, sempat melakukan rapat darurat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. PDRI di pimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Wijaya, *et al.*, 2017: 8). Namun setelah hal tersebut Belanda mengalami tekanan hebat dari dunia Internasional.

Belanda yang mendapat tekanan dunia Internasional bersedia untuk mengadakan perundingan kembali. Perundingan pertama dengan terselenggaranya perundingan Roem-Roijen mengenai penyelesaian sengketa Belanda-Indonesia akan dibahas dalam KMB. Resolusi PBB mengenai pemberian kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilanjutkan pada KMB pada 23 Agustus 1949 (Tasnur & Fadli, 2019: 65). KMB menjadi kesempatan untuk Indonesia mengakhiri perselisihan dengan Belanda.

Pada Konfrensi Meja Bundar Belanda mengakui secara *de jure* dan *de facto* kedaulatan Indonesia. Penyerahan pengakuan oleh Belanda ke Indonesia dilakukan di dua tempat Belanda dan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Hasil kesepakatan KMB adalah bentuk negara Indonesia yang menjadi Republik Indonesia Serikat (Tasnur & Fadli, 2019: 65). Pengakuan kedaulatan merupakan tujuan utama revolusi Indonesia yang sudah tercapai.

Namun sebelum pusat perhatian rakyat Indonesia mulai berganti dari yang bersifat politik menjadi sosial-ekonomi, perkembangan akhir yang besar terjadi dalam ranah politik. Perkembangan itu adalah “gerakan kesatuan”, perkembangan yang selama tujuh bulan pertama pada 1950 benar-benar mendominasi semua gerakan lain. Faktor inilah kemudian menjadi perhatian bagi Natsir dalam menangkap realitas dilapangan, dan mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi di

DPR. Hasil dari hal tersebut adalah lahirnya Mosi Integral dari seorang Mohammad Natsir.

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo (2001: 91) dengan langkah-langkah penyusunan diantaranya adalah: (1) pemilihan topik; (2) heuristik, (3) kritik Sumber; (4) interpretasi dan; (5) historiografi. Pemilihan topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual. Emosional karena penulis beragama Islam dan mengagumi sosok seorang Mohammad Natsir dan intelektual karena penulis adalah mahasiswa pendidikan sejarah. Heuristic menggunakan sumber primer dan sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal. Kritik sumber dilakukan dengan kritik internal dan eksternal yang digunakan untuk mendapatkan ontensitas dan kredibilitas sumber yang telah didapatkan sesuai dengan kajian yaitu Mohammad Natsir: Konsep Hubungan Islam dan Negara dalam Mosi Integral Natsir. Berikutnya adalah interpretasi, dengan menggunakan data-data yang ontentik dan kredibel yang didapatkan maka dilakukan analisis dan sintesis. Selanjutnya data yang sudah disintesisakan ditulis dalam bentuk historiografi.

### **Biografi Mohammad Natsir**

Mohammad Natsir lahir pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah atau 17 Juli 1908 Masehi di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Natsir mempunyai ayah bernama Idris Sutan Saipado dan Ibunya bernama Khadijah. Ayah Natsir adalah seorang juru tulis kontrolir di Maninjau. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung antara lain Yukinah, Rubiah dan Yohanusun (Hakiem, 2019: 6; Sholikhah, 2016: 27). Kehidupan seorang Natsir kecil diwarnai oleh nuansa Islam yang kental dan semangat memperoleh pendidikan yang tinggi.

Masa kecil Natsir penuh dengan didikan Islam. Pada masa itu, adat Minangkabau bagi seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun pada malam hari harus tidur di Surau bersama teman

sebayanya. Rumah Idris kala itu berada tidak jauh dari Surau, sehingga Natsir kecil tidur di Surau sembari mengaji juga mendalami Islam bersama teman-temannya (Hakiem, 2019: 6). Pendidikan Islam yang didorong oleh orangtuanya mempunyai dampak positif bagi Natsir untuk belajar di pendidikan formal.

Natsir kecil pernah belajar di Sekolah Kelas II. Di sekolah kelas II beliau bertatus bukan murid melainkan hanya menumpang belajar saja (Hakiem, 2019: 7). Selanjutnya Natsir dapat bersekolah di HIS (*Hollands Inlandsche School*) Adabiyah Padang dan kemudian pindah ke HIS Solok yang baru dibuka serta Madrasah Diniyah sore harinya pada 1916-1919 (Kamaruzzaman, 2001: 54; Dzulfikriddin, 2010: 2). Pendidikan dari seorang Natsir muda terus berlanjut menyelesaikan sekolahnya yang ia inginkan.

Di HIS Solok Natsir hanya bertahan tiga tahun dan melanjutkan pendidikannya ke HIS Padang di kelas V dan VII. Beliau menyelesaikan pendidikannya di HIS dengan nilai baik. Natsir melanjutkan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgebroid Lager Onderwijs*) di Padang. Di MULO beliau mendapatkan beasiswa 20 *Gulden* setiap bulan. Selain itu, di MULO beliau juga belajar bermain biola, menjadi anggota pandu *Natipij* (*Nationale Indoneisische Padvinderij*), *JSB* (*Jong Sumatranen Bond*), dan *JIB* (*Jong Islamieten Bond*). Natsir berhasil lulus dari HIS dengan nilai yang baik pada 1927 (Hakiem, 2019: 12; Dzulfikriddin, 2010: 2; Sholikhah, 2016: 27). Keinginan untuk bersekolah terus dilanjutkan meskipun perlu merantau ke Pulau Jawa.

Setelah lulus dari MULO, Natsir mengalami kebimbangan dimana beliau berfikir untuk melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Namun cita-citanya menjadi seorang sarjana di bidang hukum atau *Meester in de Rechten* (Mr), mendorong Natsir untuk melanjutkan sekolah ke AMS (*Algemeene Middelbare School*) di Bandung. Restu dari orangtua beliau dapatkan sehingga jalan untuk melanjutkan pendidikannya terbuka dan mendapatkan peluang beasiswa di AMS (Hakiem, 2019: 14-15). Restu orangtua merupakan ridho

dari Allah SWT yang dibawa oleh Natsir untuk terus mencapai cita-citanya.

Permohonan Natsir dikabulkan dalam memperoleh beasiswa di AMS Bandung. Tiap bulan dia mendapatkan beasiswa 30 *Gulden*. Ketika dalam perjalanan menuju Bandung menggunakan kapal laut, Natsir bertemu dengan anak-anak muda sebayanya yang juga akan melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Salah satu yang paling diingat oleh Natsir ketika itu adalah sosok seorang Abu Hanifah yang kelak menjadi dokter dan tokoh partai Masyumi serta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat 1950 (Hakim, 2019: 14-15). Natsir beradaptasi di AMS dengan baik bahkan beliau bersemangat dalam menjalani masa pendidikannya.

Bandung Juli 1927, Natsir pertama kali belajar di sekolah AMS *Afdeling A*. Ketika belajar di AMS, Natsir aktif menjadi anggota JIB cabang Bandung. Beliau terpilih menjadi ketuanya sejak 1928-1932. Di JIB Natsir berkenalan dengan banyak tokoh seperti Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Mr Mohammad Roem, dan lain-lain. Natsir juga dapat bertemu dengan beberapa tokoh gerakan politik pada saat itu, seperti Haji Agus Salim, H.O.S Tjokroaminoto, dan Syaikh Ahmad Syurkati (Dzulfikriddin, 2010: 2). Pendidikan di Bandung membawanya kedalam persahabatan dengan seorang tokoh yang akan mempertajam pemikirannya.

Pada periode menempuh pendidikannya, Natsir berkenalan dengan Ahmad Hassan pendiri Persatuan Islam (Persis). Ahmad Hassan diakui oleh Natsir sebagai salah satu orang yang berpengaruh terhadap pemikirannya. Natsir sering berkunjung ke rumah Hassan dan selalu berdiskusi mengenai tema Islam, politik, dan sosial kemasyarakatan (Hakim, 2019: 14-23; Luth, 2005: 23). Pertemuan dengan Hassan ini kemudian merubah jalan hidupnya.

Natsir lulus dari AMS pada tahun 1930. Beliau mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke

*Rechts Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Namun keinginan itu berubah ketika Natsir memilih menjadi guru agama dan jurnalis di majalah *Pembela Islam*. Natsir mengajar agama di beberapa sekolah MULO *Javastraat* di Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari. Mengajar agama merupakan panggilan jiwanya, karena melihat realitas bahwa pembelajaran agama pada masa itu belum memadai (Dzulfikriddin, 2010: 3; Luth, 2005: 23). Natsir terpanggil untuk menyelesaikan persoalan pendidikan dengan membuka sekolah di Bandung.

Natsir membuka sebuah sekolah di Bandung dan menamainya dengan “Pendidikan Islam” (Pendis) pada tahun 1930. Sekolah itu benar-benar dimulai dari nol. Natsir memulai kegiatan pendidikannya dengan lima orang murid di sebuah ruangan yang disewa di simpang Jalan Pangeran Sumedang, Bandung. Perlengkapan hanya sebuah meja panjang. Pelajaran dimulai pukul tiga sampai lima sore. Sedikit demi sedikit sekolah tersebut berkembang pesat karena kepercayaan masyarakat (Dzulfikriddin, 2010: 3). Dunia pendidikan yang menjadi profesi Natsir diseriisi dengan memperdalam ilmu pendidikan.

Natsir memperdalam ilmu pendidikan dan wawasannya dengan mengikuti kursus guru diploma sejak pertengahan 1931. Kursus tersebut berhasil ditamatkannya hanya dalam satu tahun dengan memperoleh ijazah *Lager Onderwijs* (LO). Sebagai hasilnya, beliau menyusun rumusan atau rencana “Pendidikan Islam” untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah guru. Sekolah Islam yang dibinanya terdiri dari empat jenjang diantaranya Taman Kanak-Kanak (*Froebelschool*), HIS, MULO dan *Kweekschool* (Dzulfikriddin, 2010: 3). Natsir tertarik ke dunia pendidikan karena keinginannya membangun satu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan hakikat ajaran Islam.

Pendidikan Islam menurut Natsir ditunjukan untuk membentuk manusia yang seimbang. Seimbang kecerdasannya dan keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul serta seimbang

kemahiran tangannya untuk bekerja. Hasil dari konsep pendidikan Islam Natsir tidak mengecewakan. Pendidikan Islam kembali dan terjun ke masyarakatnya (Dzulfikriddin, 2010: 4). Keberhasilan Natsir dalam pendidikan Islam membawanya menjadi salah satu pendiri dari Pesantren Persis 1936 di Bandung.

Selain dalam bidang pendidikan, Natsir juga menggeluti bidang jurnalistik. Natsir menjadi jurnalis dan bekerjasama dengan Ahmad Hassan pada tahun 1940 menerbitkan majalah *Pembela Islam*. Majalah tersebut memberikan kesempatan kepada Natsir untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Islam dan pembaruan. Beliau memakai nama samaran *Is.26* pada tulisan-tulisannya. Selain pada majalah *Pembela Islam*, Natsir juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke *Pandji Islam* dan *Pedoman Masyarakat* (Dzulfikriddin, 2010: 4). Natsir pada akhirnya juga tertarik kepada bidang politik.

Natsir pada tahun 1938 mulai aktif di bidang politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Ia menjabat ketua PII Bandung pada tahun 1940 hingga tahun 1942 serta bekerja di pemerintahan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945 dan merangkap Sekertaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta (Luth, 2005: 24). Kedatangan Jepang ke Indonesia merubah peta perpolitikan Indonesia, namun kalangan Islam dirangkul oleh Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Jepang merasa perlu merangkul Islam. Menanggapi respon dari Jepang maka dibentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan organisasi politik Islam. Perkembangan selanjutnya, majelis ini berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 7 November 1945 (Luth, 2005: 24). Masyumi kelak menjadi kendaraan politik bagi Natsir.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Natsir tampil menjadi salah seorang politisi dan pemimpin negara. Natsir dipercaya menjadi anggota Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada saat perdana menteri Sutan Sjahrir memerlukan dukungan Islam untuk kabinetnya, Sjahrir meminta Natsir menjadi menteri penerangan (Luth, 2005: 25). Sebagai seorang politikus langkah besarnya terdapat ketika masa Republik Indonesia Serikat.

Langkah strategis Natsir melalui Mosi Integral pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) 3 April 1950 membawa jalan ke puncak karirnya (Luth, 2005: 25). Presiden Soekarno mengundang Natsir ke Istana pada 22 Agustus 1950 menjadi formatur kabinet. Setelah menyusun 15 hari dan terbentuk pada 6 September 1950, selanjutnya pada 7 September 1950 Kabinet Natsir dilantik. Hal yang ditinggalkan dan masih bisa dirasakan hingga sekarang dari kebijakan kabinet Natsir adalah pelajaran agama di sekolah (Hakiem, 2019: 239-260). Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno pada tahun 1958, Natsir mengambil sikap menentang politik pemerintah.

Keadaan ini mendorong Natsir bergabung dengan para penentang lainnya. Mereka membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatra. Tokoh PRRI menyatakan bahwa pemerintah di bawah Presiden Soekarno saat itu secara garis besar telah menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Luth, 2005: 25). PRRI berhasil ditumpas dan menjadi konsekuensi buruk pada saat itu bagi para pendukungnya dengan menjatuhkan hukuman.

Sebagai akibat tindakan Natsir dan tokoh PRRI lainnya yang didominasi anggota Masyumi, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Natsir dikirim ke Batu, Malang (1962-1964) untuk menjalani masa tahanan, sedangkan partai Masyumi dibubarkan tahun 17 Agustus 1960. Natsir dibebaskan pada Juli 1966 setelah pemerintahan Orde Baru (Luth, 2005: 25). Pergantian era tidak membuat daya kritis Natsir tumpul.

Pada pemerintahan Orde Baru Natsir tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Beliau tidak

diajak oleh pemerintah Orde Baru untuk ikut serta memimpin negara. Tetapi Natsir dapat berperan melalui yayasan yang dibentuknya bersama para ulama di Jakarta, yaitu Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Natsir pada masa Orde Baru tetap kritis yang berakibat pada renggangnya hubungan dengan Pemerintah Orde Baru. Natsir ikut menjadi bagian dari petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980 sebagai aksi koreksi terhadap pemerintah. Akibat dari itu Natsir dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan (Luth, 2005: 27). Perlakuan yang diterima Natsir di dalam negeri pada masa Orde Baru berbalas dengan apa yang ia dapat dari pengakuan publik internasional.

Natsir menerima berbagai perhargaan dari internasional. Natsir menerima penghargaan internasional berupa Bintang Penghargaan dari Tunisia dan Yayasan Raja Faisal Arab Saudi (1980). Pada bidang akademik Natsir menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Lebanon (1967) dalam bidang Sastra, Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Sains Teknologi Malaysia (1991) dalam bidang pemikiran Islam (Luth, 2005: 27). Berbagai penghargaan tersebut merupakan buah dari perjuangan dan pengalaman beliau dalam berbagai bidang yang digeluti dan dampak yang besar bagi Indonesia.

Muhammad Natsir wafat pada tanggal 14 Sya'ban 1413 H atau 6 Februari 1993 Masehi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 85 tahun. Natsir menuangkan berbagai karya ilmiah melalui pemikirannya. Semasa hidupnya telah menulis sekitar 52 judul tulisan sejak 1930. Sejarah mencatat bahwa Indonesia di abad ke-20 memiliki tokoh muslim bertaraf nasional dan internasional yaitu seorang Muhammad Natsir (Luth, 2005: 27). Berbagai karya beliau dan pemikirannya akan tetap abadi dan menjadi bahan kajian dan refrensi dalam mengembangkan arah kemajuan negara Indonesia.

### **Konsep Hubungan antara Negara dan Islam Dalam Mosi Integral Natsir**

Pada tanggal 3 April 1950 Natsir tampil di podium paripurna Parlemen Republik Indonesia Serikat. Natsir menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Mosi tersebut adalah respon dari pergolakan yang ada di Republik Indonesia Serikat. Resolusi dan demonstrasi di berbagai penjuru negeri menarik perhatian Natsir. Natsir berpikiran bahwa berbagai maksud dari resolusi dan demonstrasi jika dibiarkan dan tanpa arah kemudian akan menjadikan kondisi yang lebih berbahaya bagi keutuhan negara (Hakim, 2019: 219). Atas hal tersebut maka Natsir ingin membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia yang pada masa itu juga telah ada riak-riak di berbagai daerah untuk kembali ke persatuan dan kesatuan Indonesia.

Perkembangan “gerakan kesatuan” selama tujuh bulan pertama pada 1950 benar-benar mendominasi semua gerakan. Perkembangan itu dapat dipahami lebih baik dengan cara mempelajari rancangan UUD Federal yang berlaku sejak 27 desember 1949, hingga sekitar tujuh bulan kemudian sebelum diubah oleh konstitusi kesatuan yang mengatur Republik Indonesia Serikat yang baru.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat menetapkan suatu federasi yang terdiri dari 16 negara bagian. Negara bagian yang terbesar adalah Republik Indonesia dengan populasi lebih dari 31 juta jiwa dan meliputi wilayah yang hampir sama dengan yang dimiliki sesuai dengan Perjanjian Renville. Sejumlah 15 negara bagian lainnya yaitu negara boneka atau semi boneka serta daerah-daerah istimewa yang dulu didirikan oleh Belanda dengan penduduk berkisar sekitar 100 ribu-11 juta jiwa (Kahin, 2013: 622). Berbagai daerah tersebut diwakili oleh senator.

Tanpa menghiraukan jumlah penduduknya, masing-masing negara bagian Republik Indonesia Serikat diwakili oleh dua orang senator. Setiap senator ditunjuk oleh pemerintah negara bagian yang diwakilinya dan dipilih dari tiga calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia Serikat.

Senator mengurus hal “khusus” yang mengacu pada salah satu, beberapa, atau seluruh wilayah atau bagian wilayah itu, atau terkait dengan hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan wilayah-wilayah konstituen. Senat Republik Indonesia Serikat terdiri atas 32 orang senator dengan memegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan (Kahin, 2013: 622). Meskipun terdapat perwakilan oleh senator dan dewan perwakilan konflik dan masalah tetap terjadi.

Pelaksanaan Republik Indonesia Serikat dalam ketatanegaraan dan kondisi dalam negeri tidaklah stabil dan banyak menimbulkan masalah dan konflik. Didalam federasi Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia yang lama pada dasarnya tetap otonom dan terjalin kebingungan dalam pengadministrasian dan pencatatan sipil. Rakyat lebih nyaman dengan sistem administrasi Republik Indonesia dibanding negara federal. Sebagian besar rakyat Indonesia merasa tidak puas dengan sistem federal yang dibebankan. Diseluruh 15 negara bagian hasil ciptaan Belanda diwujudkan dengan tuntutan massa yang spontan serta semakin meluas dan serempak untuk penghapusan apa yang dianggap sebagai federalisme yang dipaksakan (Nasution, 1979: 397). Berbagai persoalan tersebut diperparah dengan berbagai pemberontakan yang muncul.

Pemerintahan Republik Indonesia Serikat banyak sekali timbul pemberontakan yang terjadi. Seperti masalah Darul Islam di Jawa Barat yang tak kunjung selesai; Sultan Hamid II yang mengadakan kudeta dengan mengirimkan pasukan Westerling ke Jakarta; Pemberontakan Andi Azis, Kahar Muzakar, Ibnu Hajar, di Negara Indonesia Timur; serta yang paling mencolok adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ketidakstabilan dan terancamnya keamanan negara, banyak pihak dan mayoritas rakyat di negara bagian mendesak untuk kembali ke Republik Indonesia (Kahin, 2013: 630). Ketidakstabilan akibat politik, administrasi dan pemberontakan menguatkan gerakan persatuan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan-keadaan didaerah dengan beragam masalah membuat proses integrasi ke Republik Indonesia menguat. Negara federal dengan segera berproses menjadi Negara Kesatuan. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat RIS mulai bersidang pada 15 Februari 1950, maka atas desakan pergerakan rakyat dan parlemen gugurlah negara serta daerah bagian satu persatu. Pada akhirnya seluruh federalis meminta diri dari seluruh susunan ketatanegaraan Indonesia menjadi unitaris. Hal-hal tersebut kemudian menjadi bahan landasan Natsir dalam berdiskusi dengan tokoh-tokoh lain diparlemen.

Sebagai ketua fraksi partai Masyumi di DPR, Natsir berinisiatif menemui dan berdiskusi dengan para pemimpin fraksi. Natsir melakukan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin fraksi yang ada di DPR. Natsir melakukan pembicaraan dengan Ir. Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tuan B. Sahetapy Engel wakil dari BFO. Tujuan dari Natsir adalah untuk mengetahui apakah yang sesungguhnya hidup didalam pikiran dikalangan parlemen (Hakiem, 2019: 219). Pergulatan pikiran yang terjadi di DPR meyakinkan Natsir untuk melakukan upaya politik di DPR.

Sepanjang dua setengah bulan Natsir melakukan *lobby* terhadap fraksi yang ada di DPR. Natsir melakukan hal yang menurutnya tidak mudah karena juga melakukan *lobby* terhadap negara-negara bagian di luar Pulau Jawa. Setelah melakukan *lobby-lobby* maka Natsir menyiapkan Mosi Integral yang menurutnya dibuat dengan sengaja dikaburkan. Tujuan pengkaburan dari Mosi Integral adalah untuk menyembunyikan kehendak ke mana tujuan dari Mosi Integral (Hakiem, 2019: 219-220). Usaha Natsir sungguh memusakan dalam usaha menuju ke persatuan dan kesatuan.

Mosi Integral dari Natsir pada akhirnya membawa proses menuju integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarnya Keputusan Presiden pada tanggal 4 April 1950 tentang pembubaran dan penggabungan negara bagian dan daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, Bangka, Bliton dan Riau menguatkan proses

integrasi. Pada tanggal 5 April 1950 Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari tiga negara bagian. Tiga negara bagian tersebut adalah Republik Indonesia di Yogyakarta, Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT) (Hakiem, 2019: 226). Usaha-usaha yang dilakuakn semakin menunjukkan progress proses integrasi menuju ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan perubahan itu dibolehkan oleh Konstitusi ini menurut pasal 190. Pasal ini berisi ketentuan bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat boleh diubah, apabila keputusan dapat diambil dengan permufakatan sidang Senat dan DPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota sidang. Syarat ini dipenuhi sehingga berubahlah bentuk federasi dengan bentuk kesatuan (Yamin, 1953: 37-38). Namun usaha tersebut tidak mudan karena masih ada hambatan dalam negeri bagian di Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur.

Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menolak model pembubaran dan penggabungan seperti yang dilakukan oleh daerah dan negara bagian lain. Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Republik Indonesia asalkan tidak disuruh bubar sendiri. Mosi Integral Natsir salah satunya juga bertujuan untuk menyatukan kedua negara Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur yang sulit untuk bergabung ke Republik Indonesia (Hakiem, 2019: 226). Kesulitan-kesulitan tersebut pada akhirnya menunjukkan hasil yang baik.

Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur mengusahakan perubahan itu kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sementara semua negara-negara bagian

yang lain telah lebih dahulu menggabungkan diri atas desakan rakyat dalam masing-masing negara bagian dan Parlemen Republik Indonesia Serikat untuk menjadi negara bagian Republik Indonesia. Usaha penggabungan tersebut dengan memakai kesempatan yang diberikan konstitusi Republik Indonesia Serikat pada pasal 44. Pada 15 Agustus 1950 dapatlah Presiden Soekarno menyatakan kepastian, bahwa tanggal 17 Agustus 1950 suasana dan susunan Unitaris sudah kembali meliputi seluruh Indonesia (Yamin, 1953: 37-38). Republik Indonesia Serikat maka dinyatakan bubar dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mosi integral yang dikeluarkan oleh Natsir tidak terlepas dari pemikirannya mengenai hubungan antara Islam dan Negara. Hal ini bisa dilihat secara eksplisit dari pidatonya dalam menyampaikan mosi. Pada pidatonya Natsir menyinggung keadaan rakyat yang serba sulit dengan masalah persatuan dan kesejahteraan rakyat. Berikut kutipan Mosi Integral mengenai kedua topik tersebut (Hakiem, 2019: 226).

“...segera sesudah penyerahan kedaulatan, di daerah timbul pergolakan. Apa yang terpendam dan tertekan selama beberapa tahun yang lalu dalam hati rakyat, sekarang meluap dan meletus berupa demonstrasi dan resolusi untuk merombak segala apa yang dirasakan oleh rakyat sebagai *restan-restan* (sisa-sisa) dari struktur kolonial di daerahnya, terutama diderah-daerah Republik di pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.... Soal-soal yang harus dihadapi oleh negara kita yang muda ini sekaligus betimbulan-timbulan dihadapan kita. Soal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang sudah begitu lama menderita, soal demokratisering (demokratisasi) pemerintahan, soal pembangunan ekonomi, soal keamanan, dan 1001 macam soal lain-lain lagi....Usaha kemakmuran rakyat, penjamin keamanan, tidak berjalan selama belum ada ketentuan politik dalam negeri. *Polieteke rust* ini tidak dapat diciptakan selama masih ada “duri-duri dalam daging” yang dirasakan oleh rakyat yang walaupun kedaulatan sudah ditangan kita, tapi masih berhadapan dengan struktur-struktur kolonial serta alat-alat politik pengepungan yang diciptakan oleh Van Mook di daerah-daerah....”

Permasalahan mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta ancaman disintegrasi akibat penderitaan negara bagian yang diprakarsai Van Mook, merongrong persatuan dan kesatuan rakyat. Konsepsi kesejahteraan rakyat dan persatuan dalam hubungan Islam dan negara menjadi hal yang cukup penting. Melalui Mosi Integral Natsir, konsepsi Islam dan negara bisa dilihat dalam dua konteks kesejahteraan dan persatuan.

Konsepsi hubungan Islam dan negara menurut Natsir berhubungan secara integral dengan bersifat simbiosismutualisme, berhubungan secara resipokal dan saling memerlukan. Natsir memandang Islam merupakan ajaran yang lengkap tidak hanya mengundang persoalan ibadah *mahdhoh* semata, tetapi mengandung aspek lain seperti kenegaraan. Pendirian sebuah negara adalah suatu keniscayaan (Suyitno, 2015: 243; Zapulkhan, 2013: 159). Hubungan Islam dan negara erat kaitannya dalam menjalankan tatanan sebuah kenegaraan.

Natsir menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Islam. Indonesia sebagai negara Islam menurut beliau secara *de facto* sudah pasti karena Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu persoalan kenegaraan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Islam sebagai dasar negara sesuai dengan QS. Az-Zariyat (51) ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS.Az-Zariyat: 56)”*

Melalui ayat tersebut beliau berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seseorang Muslim di dunia menjadi hamba Allah SWT dengan arti sepenuhnya supaya mendapat kejayaan dunia dan akhirat (Saoki, 2014: 347). Sebagai hamba dari Allah SWT maka perlu mematuhi aturan-aturan dari-Nya dengan

menjalankan pada kegiatan kenegaraan untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat.

Allah SWT telah memberikan aturan-aturan kepada manusia. Aturan-aturan tersebut terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Aturan-aturan yang berhubungan dengan sesama manusia seperti *muamalah* diberikan garis-garis besarnya seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang yang saat ini menjadi urusan negara (Saoki, 2014: 347). Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT hendaknya dijalankan dalam aktivitas kenegaraan karena sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Individu dan masyarakat diberikan prinsip-prinsip umum yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Aturan-aturan yang lebih rinci tentang pengorganisasian sebuah negara diserahkan kepada kemampuan para pemimpinnya untuk melakukan ijtihad (Suyitno, 2015: 239). Kemampuan pemimpin menurut Natsir menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah negara menurut Islam. Pemimpin perlu memutuskan perkara dengan berijtihad jika tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Negara menurut Natsir adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan khusus. Institusi secara umum adalah suatu badan atau organisasi yang mempunyai tujuan khusus dan dilengkapi oleh alat-alat material, peraturan-peraturan sendiri dan diakui oleh umum. Natsir mengatakan bahwa untuk sesuatu dinamakan institusi jika (Saoki, 2014: 349):

1. Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani maupun rohani.
2. Diakui masyarakat.
3. Mempunyai alat untuk melaksanakan tujuan.
4. Mempunyai peraturan-peraturan, norma-norma dan nilai-nilai tertentu.
5. Berdasarkan atas paham hidup.
6. Mempunyai daerah berlakunya.
7. Mempunyai kedaulatan atas anggotanya.

8. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran atas peraturan-perturan dan norma-norma.

Lebih lanjut Natsir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Islam memerlukan sarana agar berbagai aturannya dapat dijalankan, sehingga memerlukan suatu kekuatan yang dikenal sebagai negara. Natsir menegaskan antara Islam dan negara merupakan dua entitas religio-politik yang menyatu, tidak dapat dipisahkan (Saoki, 2014: 349; Suyitno, 2015: 240). Pemikiran mengenai negara Islam menurut Natsir tersebut terpengaruh oleh ajaran dari Ahmad Hassan.

Negara menurut Ahmad Hassan merupakan konsep bangsa Eropa yang akhirnya diterima negara-negara jajahannya seperti di Indonesia. Hassan juga menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban yang tinggi melalui konsep negara. Menurut Mustakim dan Ali, (2019: 36) Ahmad Hassan mempunyai tiga poin penting hubungan Islam dan negara. *Pertama*, ideology negara Indonesia berdasarkan Islam, karena Islam dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, undang-undang berdasarkan Islam yang dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. *Ketiga*, konsepsi pemimpin, bahwa pemimpin bagi orang-orang Islam tidak lain melainkan Allah SWT dan Rasulullah serta pemimpin yang beriman.

Pemikiran negara dan Islam dapat disimpulkan bahwa negara sebagai institusi perlu mewujudkan tugas dengan segala kewajiban dan haknya. Negara bertujuan untuk mensejahterakan jasmani dan rohani rakyatnya melalui aturan-aturan dari Allah SWT yang berada pada Al-Quran serta Hadist. Negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang beriman dengan mampu melakukan ijtihad yang baik. Negara dan Islam maka dari itu tidak dapat terpisahkan untuk mewujudkan peradaban yang tinggi.

Natsir selanjutnya berbicara tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Islam. Menurut beliau, Islam bersifat demokratis dengan arti bahwa Islam itu anti *istibdad*, anti absolutisme, dan anti sewenang-wenang. Demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, membetulkan pemerintahan yang zalim. Kalau tidak memberi hak kepada rakyatnya, maka untuk menghilangkan kezaliman itu diperlukan dengan kekuatan dan kekerasan jika perlu (Kamaruzzaman, 2001: 70). Demokrasi yang berdasarkan Islam mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat dengan yakin kepada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

Keyakinan kepada Allah SWT merupakan sumber energi untuk berani bersuara menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar*, kritis, walau terhadap penguasa. Hal itu merupakan esensi dari demokratis. Berpegangan kepada Islam secara benar-benar dapat berperan untuk menghambat *abus of power* penguasa dan menumbuhkan rasa berani mengatakan yang benar (demokratis) bagi rakyat. Berpedoman kepada ajaran Islam dalam mengurus negara dan masyarakat, maka sandiwara politik dapat ditekan semaksimal mungkin serta rakyat menjadi lebih berdaya (Agus, 2008: 60). Maka dari itu Islam bukan hanya saja sebuah agama melainkan pedoman dalam hal bernegara.

Pemikiran Natsir mengenai hubungan Islam dan negara merupakan sebuah pemikiran yang dilandasi dari perjalanan karir seorang Natsir. Beliau dalam perjalanannya mengakui bahwa ada beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Beberapa tokoh tersebut, selain Ahmad Hassan ialah Haji Agus Salim (Hakim, 2019). Haji Agus Salim mengajarkan makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Haji Agus Salim menegaskan umat Islam tak perlu menyampaikan makna mendalam dari Ketuhanan Yang Maha Esa dari sudut pandang ajaran Islam. Secara tersirat Haji Agus Salim ingin menyatakan, biarkanlah makna kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa hanya teryakini oleh interin umat Islam sendiri dan tentu pula biarkanlah umat lain memaknai

sila tersebut sesuai dengan asas masing-masing (Qoyyim, 2013: 521). Pada intinya makna tersirat tersebut diilhami oleh Haji Agus Salim agar bangsa Indonesia tidak dilanda konflik.

Ahmad Syafii Maarif (dalam Iman, 2006: 95-96) memberikan pendapat mengenai hubungan antara Islam dan negara dalam pemikiran Haji Agus Salim. Haji Agus Salim menurut padangan beliau dalam penciptaan suatu negara Islam di tengah-tengah rakyat yang lebih 90% masih buta huruf tidak akan berjalan baik karena landasan yang kuat diperlukan untuk membangun negara Islam yang modern. Selanjutnya Haji Agus Salim dalam suatu sudut pandang dapat mengikuti jalan pikiran nasionalis bahwa sebuah deklarasi negara Islam pada saat-saat kritis masa itu dapat memperlambat pencapaian kemerdekaan.

Sementara alasan lainnya yaitu kenyataan yang ada dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di dalam BPUPKI hanya 20% dari 68 anggota yang mendukung ide negara Islam. Ide negara Islam jika dipadukan tidak memungkinkan pihak Islam untuk menang secara demokratis. Disisi lain, Haji Agus Salim memilih lebih banyak diam tanpa menghalangi para kiyai untuk tampil kedepan (Iman, 2006: 96). Hal tersebut dapat dilihat dimana kondisi yang tidak memungkinkan tidak untuk dipaksakan ada menjadi sebuah negara Islam. Sikap dari Haji Agus Salim memilih untuk menjaga persatuan dibanding berdebat tanpa ujung mengenai konsepsi negara, sehingga sikap Haji Agus Salim jelas memilih untuk menjaga persatuan umat.

Konsep pemerintahan Islam adalah pilihan dari paham kebangsaan. Islam dipandang sebagai sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanahairan. Pemerintahan Islam didasarkan pada Al-Quran dan Musyawarah, karena Islam memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang tidak dapat dilanggar (Rifa'i, 2019: 385). Namun dengan sistem pemerintahan yang bukan negara Islam, para politikus seperti Natsir dan Haji Agus Salim memilih untuk

menjaga persatuan umat agar kelak dapat menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dalam aturan-aturan sebuah negara.

Haji Agus Salim dan Ahmad Hassan adalah salah dua dari tokoh yang mempengaruhi pemikiran Natsir dalam hubungan Islam dan negara. Haji Agus Salim dari beberapa deskripsi tentang dirinya yang selalu menghindari konflik dan menjaga persatuan merasuk pada pemikiran Natsir. Pada tokoh Ahmad Hassan bisa dianalisis bagaimana konsep dari sebuah negara, terutama negara yang berlandaskan Islam. Sebuah negara Islam yang membangun peradaban tinggi yang sejahtera rakyatnya berdasarkan kepada aturan-aturan dari Al-Quran dan Al-Hadist.

Pemikiran Natsir dari segi konsep dan ide melalui pengaruh pemikiran dari Ahmad Hassan dan Haji Agus Salim berjalan lurus dengan penyampaian sikapnya dalam Mosi Integral yang hubungannya dengan Islam dan negara. Mosi Integral disuarakan oleh Natsir untuk mensejahterakan rakyat dan mempersatukan Indonesia. Republik Indonesia Serikat adalah negara dengan banyak negara bagian yang diciptakan Belanda atas gagasan dari seorang Van Mook untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Van Mook membentuk negara federasi di Indonesia pada konferensi *Hoge Veluwe*. Meskipun gagal dalam konferensi tersebut dalam membentuk negara federal, Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi tersebut menyepakati perubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Berbagai konferensi selanjutnya digelar sampai kemudian BFO mengeluarkan resolusi pada 27 Juli 1948 yaitu mengenai konsep pemerintahan (Sari & Sugiharti, 2014: 41). Tujuan BFO adalah untuk membentuk negara federal dan mendapatkan pengakuan kedaulatan seutuhnya bagi Indonesia dari Belanda.

Perpecahan tersebut menjadi nyata ketika terpecahnya Republik Indonesia menjadi negara-negara bagian dan bahkan menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia

Serikat. Republik Indonesia Serikat yang sudah terbentuk nyatanya tidak stabil dan banyak memicu perpecahan kembali. Pemberontakan seperti Sultan Hamid II yang mengadakan kudeta dengan mengirimkan pasukan Westerling ke Jakarta, Pemberontakan Andi Azis, Kahar Muzakar, Ibnu Hajar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan, menjadi perhatian serius dari Natsir.

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi adalah bentuk ketidakpuasan dari daerah-daerah terhadap pemerintah. Persatuan yang sudah terpecah semakin terberai. Natsir sejalan dengan Haji Agus Salim tidak suka terhadap perpecahan. Hal itu bisa dilihat ketika beliau menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia meskipun beliau memperjuangkan negara Islam. Hal itu karena ingin memelihara persatuan. Maka dengan adanya perpecahan dan semakin diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan beliau ingin mempersatukan Indonesia kembali ke bentuk idealnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih ideal dalam kesatuan dan persatuannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Natsir adalah negara Islam. pendapat tersebut berdasarkan kepada keadaan secara *de facto* bahwa Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu persoalan kenegaraan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama sehingga persatuan akan terjamin melalui kekuatan komunal rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sementara Republik Indonesia Serikat terdiri dari bentukan negara federal Belanda yang telah menjajah Indonesia dan berpeluang besar merongrong persatuan Indonesia melalui negara-negara federalnya.

Menurut Jurdi (2019: 195) negara federal merupakan bentuk akal-akalan Belanda untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penyatuan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu jalan terbaik menghadapi situasi karena banyaknya perpecahan yang terjadi diberbagai daerah. Umat Islam perlu dijaga

persatuannya untuk mewujudkan peradaban yang tinggi. Pencapaian peradaban yang tertinggi maka diperlukan aturan-aturan berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang telah ada dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga umat Islam di Indonesia perlu dipersatukan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang tinggi dan sejahtera.

Selanjutnya menyoal tujuan negara menurut Natsir yaitu untuk kesejahteraan jasmani dan rohani. Pada masa Republik Indonesia Serikat tidak membaik bahkan cenderung memburuk. Kesejahteraan rakyat tidak kunjung membaik dalam bentuk Republik Indonesia Serikat karena demonstrasi-demonstrasi rakyat yang terjadi di berbagai negara bagian, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan atas kesejahterannya. Mengenai hal tersebut Natsir mempunyai pandangan bahwa negara bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani maupun rohani. Berhubungan dengan itu, banyaknya demonstrasi-demonstrasi pada rakyat adalah respon rakyat.

Pendapat Natsir mengenai demokrasi adalah hak rakyat menurut Islam. Demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik dan membetulkan pemerintahan. Islam yang menjadi mayoritas agama dari penduduk di Indonesia adalah sebuah kekuatan komunal yang meyakinkan Natsir bahwa Indonesia adalah negara Islam. Penduduk Indonesia berkeyakinan kepada Allah SWT menjadi sumber energi untuk berani bersuara menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, kritis, walaupun terhadap penguasa pemerintahan.

Demonstrasi yang banyak terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat menyoal kesejahteraan karena Republik Indonesia Serikat dianggap tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Selain itu juga kekacauan sistem administrasi yang membingungkan ditambah pemberontakan-pemberontakan juga memperparah kesejahteraan rakyat dalam mencukupi kebutuhan rakyat. Bentuk Republik Indonesia

Serikat dirasa sudah tidak stabil dan tidak cocok dengan kehendak dari rakyat Indonesia. Melalui Mosi Integral Natsir menangkap halt tersebut sebagai alasan yang kuat menuju integrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan mengenai persatuan dan kesejahteraan adalah hal mendasar dalam *Piagam Jakarta* yang telah disepakati oleh banyak tokoh Muslim. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia merupakan hal nyata yang dilihat oleh Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat. Atas respon dari rakyat berupa demonstrasi-demonstrasi dan peristiwa pemberontakan-pemberontakan dalam Republik Indonesia Serikat menggugah jiwa Natsir untuk menyelesaikan persoalan ini dan mendesak supaya pemerintah melebur negara bagian kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi Integral Natsir erat kaitannya dengan hubungan Islam dan negara.

Islam dan Negara merupakan hubungan yang bersifat simbiosismutualisme, berhubungan secara resiprokal dan saling memerlukan. Islam bukan hanya sebagai sebuah agama melainkan pedoman. Aturan-atauran dari Allah SWT diserukan dan dijalankan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Negara sebagai suatu institusi dilengkapi oleh alat-alat material, peraturan-peraturan sendiri dan diakui oleh umum mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat perihal jasmani dan rohani. Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai umat muslim sebagai mayoritas yang dapat dijadikan sebuah modal untuk mencapai peradaban yang tinggi, sehingga menjaga persatuan umat adalah hal terpenting. Nilai-nilai Islam sudah banyak terkandung dalam berbagai aturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, setelah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat justru perpecahan dalam umat terlihat nyata.

Perpecahan yang ada dalam rakyat hendaknya segera dicegah. Berbagai gejala ketidak stabilan muncul melalui beragam demonstrasi yang menuntut kesejahteraan dan berbagai pemberontakan yang menunjukkan banyaknya perpecahan. Melalui hal tersebut Natsir menyerukan melalui

Mosi Integral kembali berintegrasi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas mempunyai kesatuan yang utuh terutama dalam mempersatukan umat. Kesejahteraan akan lebih stabil terbukti setelah era Republik Indonesia Serikat pemberontakan berhasil dibendung dan kesejahteraan sedikit lebih baik. Melalui Mosi Integral Natsir hubungan Islam dan negara menjadi nyata sebagai hubungan yang timbal balik melalui persatuan umat dan kesejahteraan umat.

### **Kesimpulan**

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh nasional dan pembaharu Indonesia. Beliau dikenal sebagai dai', birokrat dan politisi ternama di Indonesia. Beliau menjadi seorang pejuang yang aktif dalam barisan pimpinan tertinggi revolusi. Peranan dari seorang Natsir menjadi sangat penting terutama dalam menyelamatkan Republik Indonesia. Mosi Integral adalah respon dari pergolakan yang ada di Republik Indonesia Serikat. Resolusi dan demonstrasi di berbagai penjuru negeri menarik perhatian Natsir. Mosi integral yang dikeluarkan oleh Natsir tidak terlepas dari pemikirannya mengenai hubungan antara Islam dan Negara. Hal ini bisa dilihat secara eksplisit dari pidatonya dalam menyampaikan mosi. Melalui Mosi Integral Natsir konsepsi hubungan Islam dan negara bisa dilihat dalam dua konteks persatuan dan kesejahteraan. Konsepsi hubungan Islam dan negara menurut Natsir berhubungan secara integral dengan bersifat simbiosismutualisme, berhubungan secara resipokal dan saling memerlukan. Islam sebagai pedoman kehidupan dipadukan dengan negara sebagai institusi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dalam hal jasmani maupun rohani. Mosi Integral disuarakan oleh Natsir untuk mempersatukan rakyat dan mensejahterakan Indonesia. Indonesia menurut beliau secara *de facto* sudah pasti menunjukkan negara Islam, bahkan lebih dari itu persoalan kenegaraan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama sehingga Republik Indonesia Serikat perlu dilebur kembali ke

Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang ideal menurut Islam. Negara dengan mayoritas agama Islam diperlukan agar umat Islam tidak dapat dipecah oleh Belanda melalui negara federal. Islam sebagai kekuatan komunal dimasyarakat diperlukan untuk membangun peradaban yang tinggi dan kesejahteraan umat dengan menempatkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam.

### Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. "Mohammad Natsir Demokrat Tulen". *100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Republika.
- Budiman, Agus. (2017). "Sejarah Diplomasi Roem-Roijen dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 4 (1), 86-104, from: <http://dx.doi.org/10.25157/wa.v4i1.388>.
- Dzulfikriddin. (2010). *Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Hakim, Lukman. (2019). *Mohammad Natsir Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Iman, Nur. (2006). "Pemikiran Haji Agus Salim". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, retrived from: <https://lib.unnes.ac.id/502/1/1551.pdf>.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kahin, George Mc Turnan. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kamaruzzaman. (2001). *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modrnis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiaterra.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Luth, Thohir. (2005). *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Yamin. (1953). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Muliati, Indah. (2015). "Pandangan M.Natsir tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya & Ekonomi*, 11 (2), 129-139, retrived from: <http://103.216.87.80/index.php/tingkap/article/view/6201>.
- Mustakim, Lupik., & Ali, Nor Huda. (2019). "Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Satra Islam*, 19 (2), 22-38, from: <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i2.4471>.
- Nasution, A.H. (1979). *Disekitar Perang Kemerdekaan Jilid 11*. Bandung: Angkasa.
- Qoyyim, Moh. (2013). "Pemikiran Haji Agus Salim tentang Aqidah, Shariah dan Ideologi". *Teosofi Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam*, 3 (2), 503-525, from: <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.503-525>.
- Rifa'i, Muh. (2019). "Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan Perspektif Politik Islam Indonesia". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5 (2), 360-387, from: <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.360-387>.
- Saoki. (2014). "Islam dan Negara menurut M. Natsir dan Abdurahman Wahid". *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4 (2), 344-367, from: <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.344-367>.
- Sari, Rizqie Novita., & Sugiharti. (2014). "Dinamika Badan Permusyawaratan Federal (BFO) menuju Kedaulatan Indonesia". *Avatara e-journal Pendidikan Sejarah*, 2 (3), 38-47, retrived from: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8398/8546>.
- Setyaningsih, Emi. (2016) "Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)". *Jurnal Tapis*, 12 (2), 73-75, from: <https://doi.org/10.24042/tps.v12i2.824>.
- Sholikhah, Aghianus. (2016). *Konsep Pendidikan Integral Perspektif Muhammad Natsir*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, Retrived from: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1307/1/AGHNIAUS%20SHOLIKHAH%20111-12-233.pdf>.

- Suyitno, Amin. (2015). "Konsepsi Negaran Menurut M. Natsir: Tinjauan dari Perspektif Pemikiran Politik Islam". *Intizar*, 21 (2), 225-246, Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/309>.
- Tabroni, Roni. (2017). "Komunikasi Politik Mohammad Natsir". *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (1), 39-60, from: <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>.
- Tasnur, Irvan., & Fadhli, Muhammad Rijal. (2019). "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan RIS (1945-1949)". 5 (2), 58-68, from: <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v5i2.6599>.
- Wijaya, Musri Indra., Isjoni., & Tugiman. (2017). "Peran Sjafruddin Prawiranegara dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI dari Agresi Militer Belanda II di Riau, Tahun 1948-1949". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 4 (2), 1-14, retrived from: <https://www.neliti.com/publications/202202/peran-sjafruddin-prawiranegara-dalam-mempertahankan-kedaulatan-nkri-dari-agresi#cite>.
- Zaprukhhan. (2013). Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3 (2), 153-167, retrived from: <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1004>.